

BAB II

KONFLIK DAN KRISIS KEMANUSIAAN SERTA KEHADIRAN INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DI SUDAN

Melalui bab ini akan dibahas mengenai konflik Sudan sejak 1955 hingga sebelum pecahnya konflik 2023, bagaimana konflik berdampak pada kemanusiaan hingga menimbulkan krisis, dan bagaimana upaya pemerintah dalam menangani konflik dari masa ke masa. Kemudian dilanjutkan dengan hadirnya ICRC di Sudan, dasar hukum dan mandatnya sebagai organisasi internasional eksklusif untuk menjalankan perannya.

2.1 Konflik dan Krisis Kemanusiaan di Sudan

Konflik yang sejak tahun 2023 terjadi di Sudan bukan merupakan hal yang baru, konflik telah terjadi bahkan setahun sebelum Sudan merdeka tahun 1955 antara Sudan bagian utara dan Sudan bagian selatan hingga konflik terbaru yang pecah di tahun 2023 antara militer Sudan (SAF) dan paramiliter (RSF). Adapun konflik yang terjadi dari masa ke masa tidak luput berdampak pada keadaan darurat terhadap orang-orang yang terdampak konflik, terutama masyarakat sipil.

2.1.1 Konflik dan Krisis Kemanusiaan Sudan Tahun 1955-1972

Konflik pertama Sudan terjadi setahun sebelum Sudan mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1956. Konflik internal ini terjadi antara Utara (Penduduk Arab-Muslim) dan Selatan (Penduduk Afrika-Non-Muslim). Menurut

Douglas H. J., dalam bukunya yang membahas tentang akar permasalahan konflik Sudan, beberapa faktor terjadinya konflik ini adalah pertama, ketidaksetaraan yang sudah berlangsung lama antara pemerintah pusat yang ada di Utara dengan wilayah pinggiran Selatan. Kedua, kemerdekaan Sudan dianggap tanpa persiapan untuk menyatukan dua wilayah dengan perbedaan yang signifikan. Ketiga, elit Muslim arab di utara menguasai gerakan nasional kemerdekaan, kemudian mereka membentuk pemerintahan dan dalam pemerintahan ini mengecualikan penduduk Selatan dari proses politik. Keempat, adapun kebijakan era kolonial Inggris sejak 1899-1947, mengatur wilayah Utara dan Selatan sebagai dua identitas terpisah. Pada 1947, kebijakan kolonial menggabungkan keduanya dan memicu ketakutan akan dominasi Utara dengan upaya ‘Arabisasi’ atau ‘Islamisasi’.¹³

Konflik sepanjang 17 tahun ini menyebabkan sebanyak 500.000 orang mengungsi dan sebanyak 1 juta kematian yang sebagian merupakan masyarakat sipil. Adapun pemberontakan terjadi di kota-kota dengan instalasi atau pangkalan militer (garnisun), seperti Torit, Yei, Juba, dan Maridi.¹⁴ Untuk menangani konflik tersebut, pemerintah melakukan pendekatan militer dengan mengerahkan pasukan pemerintah ke wilayah Selatan, memberlakukan keadaan darurat di beberapa provinsi yang ada di Selatan, juga melakukan penindasan terhadap kelompok

¹³ Douglas H. Johnson. *The Root Causes of Sudan's Civil Wars: Peace or Truce?* Diakses dalam: <https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA293544277&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=21522448&p=AONE&sw=w&userGroupName=anon%7Ea7346be6&aty=open-web-entry#:~:text=Johnson's%20intent%20is%20look%20into,term%20process%20of%20democratic%20transition.> (10/10/2025. 19.29 WIB)

¹⁴ Sudanese American Physician Association. *Sudan Civil War: History & Implications (6 Root Causes)*. Diakses dalam: <https://sapa-usa.org/sudan-civil-war/> (11/10/2025. 04.28 WIB)

Anyanya (gerakan pemberontak separatistis di Sudan Selatan yang memperjuangkan otonomi daerah), yang pemerintah anggap sebagai pemberontak.¹⁵

Pemerintah juga melakukan pendekatan politik round table Conference 1965 yang diselenggarakan di Khartoum (suatu wilayah di Utara) dan dihadiri perwakilan partai-partai politik Utara dan Selatan, juga pengamat dari negara-negara Afrika lainnya. Konferensi meja bundar ini adalah upaya politik pertama yang dilakukan pemerintah Sudan, dan menghasilkan komite 12 orang dan proposal sebanding dengan Perjanjian Addis Ababa, namun pemerintah 1960-an Sudan tidak pernah mengimplikasikan proposal tersebut.¹⁶ Hal ini terbukti dengan berlanjutnya konflik sampai pada tahun 1972, baik pemerintah Khartoum dan pemberontak Selatan telah menandatangani Perjanjian Addis Ababa.

Perjanjian Addis Ababa, di Ethiopia, ditandatangani pada tanggal 12 Maret 1972, oleh pemerintah Sudan yang dipimpin oleh Presiden Jaafar Nimeiry dan *Southern Sudan Liberation Movement/SSLM* (perpecahan dari Anyanya) yang mewakili wilayah Selatan. Perjanjian ini secara resmi mengakhiri konflik pertama Sudan tahun 1955-1972, dengan isi perjanjian Isi perjanjian tersebut adalah (1) Penghentian Perang Saudara Pertama Sudan; (2) Otonomi Regional untuk Sudan Selatan dengan wilayah otonom tiga provinsi: Equatoria, Bahr el-Ghazal, dan

¹⁵ Operation Broken Silence. *Sudan's Independence to Partition With South Sudan*. Diakses dalam: <https://operationbrokensilence.org/blog/sudan-independence-to-civil-war-south-sudan#:~:text=Aftermath,most%20destructive%20in%20human%20history>. (11/10/2025. 08.43 WIB)

¹⁶ Marit Magelssen Vambheim. *Making Peace While Waging War, A Peacemaking Effort in the Sudanese Civil War. 1965-1966*. Diakses dalam: https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/2359/Masterthesis_Vambheim.pdf?sequence=1&isAllowed=y (11/10/2025. 09.06 WIB)

Upper Nile; (3) Kebebasan Beragama dan Budaya; (4) Pembagian Kekuasaan Politik; (5) Pengaturan Ekonomi dan Pembangunan; (6) Integrasi Militer; (7) Sistem Bahasa.¹⁷ Perjanjian ini berhasil membawa perdamaian di Sudan. Namun perjanjian ini pun hanya bertahan selama 11 tahun, Pada 1983, perjanjian ini mulai dilanggar dan memicu konflik panjang selanjutnya.

Konflik Sudan pada tahun 1955-1972 merupakan konflik saudara yang terjadi antara pemerintah Sudan yang baru merdeka di bawah kepemimpinan Presiden Nimeiry (Sudan Utara) dengan Anyanya/SSLM (Sudan Selatan). Konflik ini dapat dikatakan sebagai keberlanjutan dari ide kolonial yang lebih memusatkan perhatian pada Sudan bagian Utara sehingga timbul ketimpangan, antara Sudan Utara dan Selatan bahkan hingga Sudan diberi kemerdekaannya sendiri. Beberapa tuntutan Sudan Selatan adalah kebebasan mereka untuk beragama tanpa dibedakan, ikut andil dalam politik, pemerintah, dan militer Sudan, serta pembangunan. Kedua pihak yang berkonflik memilih pendekatan militer untuk mewujudkan keinginan masing-masing pihak hingga 17 tahun lamanya. Pada 1972, melalui Perjanjian Addis Ababa, Sudan Selatan akhirnya mendapatkan otonom regional.

2.1.2 Konflik dan Krisis Kemanusiaan Sudan Tahun 1983-2005

Pada tahun 1983, Islam Arab telah berkembang pesat di Utara dan menjadi kekuatan politik yang besar, sehingga untuk mempertahankan kekuasaannya,

¹⁷ Peacemaker. *The Addis Ababa Agreement on the Problem of South Sudan*. Diakses dalam: <https://peacemaker.un.org/sites/default/files/document/files/2024/05/sd720312addis20ababa20agreement20on20the20problem20of20south20sudan.pdf> (03/10/2025. 05.57 WIB)

Presiden Nimeiry mendeklarasikan Sudan secara keseluruhan sebagai negara Islam. Terlebih lagi pada tahun 1978, sejumlah besar minyak ditemukan di wilayah Selatan dan membuat Utara menguasai wilayah-wilayah tersebut, ini berarti bahwa otonomi Selatan sesuai dengan perjanjian Addis Ababa 1972 telah dilanggar. Sebagai respon, *The Sudan People's Liberation Army/SPLA* (didirikan pada tahun yang sama dengan dimulainya konflik kedua ini, dengan tujuan Sudan Selatan otonom), penerus dari gerakan SSLM memberontak dan merebut sebagian besar wilayah pedesaan yang ada di Sudan Selatan dan membuat pemerintah Sudan lengah. Tahun 1984, hukum Islam diakhiri, dan tahun 1985 terjadi kudeta oleh Kolonel Omar Al-Bashir yang menggulingkan Presiden Nimeiry.¹⁸

Omar Al-Bashir pada tahun 1989, menjabat sebagai presiden, kepala negara, perdana menteri hingga panglima angkatan bersenjata. Presiden Bashir meneruskan islamisasi Sudan dengan menerapkan hukum syariah Islam pada tahun 1991. Kemudian pada tahun 1992, terjadi konflik besar masih antara pemerintah Sudan melawan SPLA. Masyarakat tanpa senjata juga terdampak bom dengan senjata konvensional dan kimia. Ribuan milisi milisi Utara pada saat itu dilepaskan untuk menjarah, membunuh, dan menduduki penduduk Selatan. Pada akhir 1990-an, dengan persenjataan serta pelatihan dari Uganda dan Etiopia, SPLA kembali menguasai wilayah pedesaan Sudan Selatan secara lebih luas. Pada tahun 2002, pemerintah AS mengesahkan Undang-Undang Perdamaian Sudan. Pemerintah AS mendukung perjuangan Sudan Selatan dan mengkonfrontasi rezim Bashir di

¹⁸ Sudanese American Physician Association, *Op. Cit.*

panggung internasional dan rezim Bashir pun terisolasi dari panggung internasional.

Pertempuran mereda pada tahun 2003 dan 2024. Kemudian pada 2005, *Comprehensive Peace Agreement/CPA* ditandatangani oleh SPLA dan rezim Bashir. Hasil dari perjanjian ini adalah pemberian periode otonomi sementara selama 6 tahun untuk menuju kemerdekaan Sudan Selatan. Hingga pada tahun 2011, Sudan Selatan menjadi negara termuda di dunia.¹⁹ Namun, tiga wilayah, seperti Abyei, Kordofan Selatan, dan Nil Biru masih diberi status khusus di bawah perjanjian CPA, dan untuk sementara dikelola bersama oleh pemerintah Sudan Utara maupun Selatan, khususnya wilayah Abyei.²⁰ Adapun dampak dari konflik ini tidak pernah dihitung oleh pihak yang berkonflik. Sepanjang 1983 sampai 2005, sebanyak 2 juta korban jiwa yang telah dilaporkan.²¹

Konflik kedua yang terjadi di Sudan memiliki durasi yang lebih panjang, yakni 23 tahun. Konflik ini dipicu pelanggaran pertama atas otonom Sudan Selatan yang tercatat dalam perjanjian Addis Ababa 1972, karena ditemukan sejumlah besar minyak di wilayah Selatan pada tahun 1978. Namun konflik baru pecah pada tahun 1983 antara pemerintah Sudan dan SPLA, setelah Presiden Nimeiry mendeklarasikan Sudan sebagai negara Islam secara keseluruhan. Adapun pemerintahan Bashir pada 1989 justru melanjutkan penerapan hukum syariah

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Britannica. *Sudan Under Bashir*. Diakses dalam: <https://www.britannica.com/place/Sudan/Sudan-under-Bashir> (12/10/2025. 11.04 WIB)

²¹ Study of Internal Conflict (SOIC). *Second Sudanese Civil War 1983-2005*. Diakses dalam: https://media.defense.gov/2025/Feb/25/2003651741/-1/-1/0/20250204_SECONDSDUDAN_1983-2005.PDF (12/10/2025. 11.09 WIB)

Islam. Konflik ini akhirnya berakhir pada tahun 2005, karena intervensi internasional, sehingga ditandatangani CPA dengan garis besar periode otonomi sementara untuk Sudan Selatan sebelum kemerdekaannya pada tahun 2011.

2.1.3 Konflik Darfur sejak 2003

Darfur merupakan rumah bagi banyak kelompok etnis yang bisa dikategorikan menjadi dua, yakni Arab dan Non-Arab. Konflik yang terjadi di Darfur berakar pada hal yang sama dengan konflik-konflik sebelumnya, yakni ketegangan etnis. Selain itu, sejak 1970 hingga 1980-an, kekeringan parah membuat persaingan meningkat antara pengembala nomaden (Arab) dan petani menetap (Non-Arab/Afrika) terhadap lahan subur dan air. Pemerintah juga dianggap lalai terhadap wilayah Darfur dengan sangat minimnya pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan, sehingga memicu perasaan terpinggirkan hingga kebencian terhadap pemerintah pusat. Akhirnya pada tahun 2003, *Sudan Liberation Movement/SLM* (Terdiri dari etnis Fur/Afrika yang mengupayakan untuk mengatasi marginalisasi politik dan ekonomi di Darfur) dan *Justice and Equality Movement/JEM* (memiliki tujuan reformasi sistem politik Sudan dan mengatasi ketidaksetaraan), melancarkan serangan terhadap pemerintah dengan alasan perlunya perlindungan untuk masyarakat non-Arab dan menuntut distribusi sumber daya yang adil.²²

Sebagai respon dari pemerintah Sudan, milisi Arab-Janjaweed didukung dengan senjata dan peralatan komunikasi oleh intelejen militer Sudan sehingga

²² War Wings Daily. *The Darfur Conflict*. Diakses dalam: <https://warwingsdaily.com/wars/the-darfur-conflict-2003-present/> (13/10/2025. 09.29 WIB)

mengalahkan SLM dan melakukan pembersihan etnis terhadap orang-orang Masalit, Fur, dan Zaghawa dengan membunuh, memperkosa, memutilasi, dan menculik anak-anak. Pada tahun 2006, pemerintah Sudan menandatangani *Darfur Peace Agreement/DPA* bersama dengan SLA-Minawi (faksi SLM yang lebih militeristik) dan menjadi pencapaian penting untuk perdamaian Darfur. Perjanjian ini mengatasi marginalisasi Darfur yang telah berlangsung lama secara adil, juga memetakan jalan perdamaian yang abadi bagi para korban konflik, juga pihak pemberontak dianugerahi posisi *Senior Assistant to the President and Chairperson of the Newly Established Transitional Darfur Regional Authority/TDRA*. Pada perjanjian ini terdapat peran internasional, yakni *Africa Union/AU* dan UN. Pemerintah juga bertanggung jawab memberi kompensasi sebesar kurang-lebih 497 miliar rupiah kepada korban konflik.²³ Namun meskipun terdapat perjanjian ini, konflik masih terus berlanjut sehingga perjanjian dibuat ulang pada 2011.

Doha Document for Peace in Darfur/DDPD, ditandatangani pemerintah Sudan menjadi salah satu format upayanya pada perdamaian Darfur, bersama satunya kelompok yang menandatangani, yakni *Liberation and Justice Movement/LJM*. Dimediasi oleh AU, UN, dan Qatar, perjanjian ini menghasilkan penetapan Darfur sebagai bagian integral dari Sudan, TDRA diganti menjadi *Darfur Regional Authority/DRA* karena sifatnya yang sudah tetap, serta jatah kursi dalam parlemen nasional Sudan dan jabatan tertentu di eksekutif pusat. Selain itu di bidang ekonomi dan kekayaan, pemerintah Sudan mempunyai tanggung jawab

²³ U.S> Department of State. *Darfur Peace Agreement*. Diakses dalam: <https://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2006/65972.htm> (13/10/2025. 11.06 WIB)

sebesar kurang-lebih 33 triliun rupiah untuk pembangunan Darfur, infrastruktur, air bersih, kesehatan dan pendidikan. Selain itu juga terdapat isi mengenai pengaturan pembagian hasil sumber daya alam, baik itu minyak dan mineral, secara adil, dan perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk gencatan senjata permanen antara pemerintah Sudan dan pihak pemberontak yang menandatangani. Monitoring sendiri akan dilakukan oleh *Implementation Follow-up Committee/IFC*, terdiri dari pemerintah Sudan, pihak pemberontak yang bertandatangan, UN, AU, dan mediator internasional.²⁴

Meskipun demikian, konflik masih berlanjut dan bertumpuk hingga pecahnya konflik Sudan terbaru pada tahun 2023. Adapun faktor yang mempengaruhi gagalnya perjanjian-perjanjian tersebut, DPA dan DDPD, adalah yang pertama, ketidakpercayaan bersama antara pihak pemerintah Sudan dan pemberontak. Kedua, kelemahan proses mediasi, baik itu ketidakmampuan dari segi mediator sendiri untuk bersikap netral hingga persiapan-persiapan untuk negoisasi, selain itu tekanan tenggat waktu yang dilakukan mediator membuat proses penandatanganan perjanjian menjadi terburu-buru dan implikasinya pun tidak maksimal. Ketiga, strategi partisipasi yang tidak konsisten, yang artinya keterwakilan para pemangku kepentingan dalam konflik, tidak pernah dipastikan representasinya dalam negoisasi. Keempat, fragmentasi gerakan pemberontak yang pada pecahnya konflik tahun 2003 hanya berjumlah dua kelompok pemberontak,

²⁴ *Doha Document for Peace in Darfur*. Diakses dalam: <https://atjhub.csvr.org.za/wp-content/uploads/2025/08/Doha-Documents-for-Peace-in-Darfur-DDPD.pdf> (13/10/2025. 17.42 WIB)

namun secara bertahap terus memecah menjadi beberapa faksi, hal ini membuat konflik semakin kompleks.²⁵

Human Right Watch/HRW melaporkan sejak Agustus 2003, di Darfur Barat, pedesaan dikosongkan dari penduduk asli Fur dan Masalit. Kehidupan ternak, sumur dan pompa, toko makanan, dan fasilitas penting bagi masyarakat sipil telah dijarah atau dihancurkan. Di wilayah Dar Masalit, sejak September 2003 sampai akhir Februari 2004, sebanyak 770 masyarakat sipil tewas.²⁶ Hingga 2008, korban jiwa mencapai sekitar 300.000 hingga hampir 500.000 jiwa menurut *the UN head of humanitarian affairs*, John Holmes.²⁷ Adapun pemerintah transisi Sudan di akhir tahun 2020, telah membuat UN mengakhiri mandat *African Union-United Nations Hybrid Operation in Darfur/UNAMID*, pada 31 Desember 2020, pemerintah transisi Sudan akan sepenuhnya mengambil alih peran utama UNAMID sebagai pelindung warga sipil, fasilitator pengiriman bantuan kemanusiaan, pendukung mediasi konflik antar komunitas, dan lain-lain.²⁸ Berdasarkan *investigasi Institute for War and Peace Reporting*, hal ini juga berdasar pada keengganan masyarakat internasional untuk melawan campur tangan dan hambatan

²⁵ Beyond Intractability. *The Darfur Peace Process: Understanding the Obstacles to Success*. Diakses dalam: <https://www.beyondintractability.org/casestudy/netabay-darfur> (13/10/2025. 21.54 WIB)

²⁶ Human Right Watch. *Darfur Destroyed*. Diakses dalam: <https://www.hrw.org/report/2004/05/06/darfur-destroyed/ethnic-cleansing-government-and-militia-forces-western-sudan> (14/10/2025. 17.17 WIB)

²⁷ One-Minute World News. *Darfur Deaths 'could be 300.000'*. Diakses dalam: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7361979.stm> (14/10/2025. 19.58 WIB)

²⁸ UNAMID. *Closure of UNAMID*. Diakses dalam: <https://unamid.unmissions.org/unamid-ends-its-mandate-31-december-2020> (14/10/2025. 19.41 WIB)

pemerintah Sudan.²⁹ Hal ini tidak menjamin Darfur aman dari serangan, karena terdapat 3 serangan besar, di kota padat penduduk, El Geneina, ibu kota Darfur, pada April 2021, serangan di kota Kereneik pada Desember 2021 dan April 2022.³⁰

Konflik Darfur terjadi pada tahun 2003 hingga perkiraan 2020 jika berdasar pada penutupan misi perdamaian UNAMID. Berdasar pada konflik yang terjadi selama hampir dua dekade, Sudan masih bermasalah pada kegagalan dalam membangun keadilan sosial hingga politik, sehingga akibat kegagalan yang berulang ini, kurang-lebih 300.000 korban jiwa yang tercatat hingga 2008. Berbagai perjanjian DPA pada tahun 2006 dan DDPD pada tahun 2011, ditandatangani oleh pemerintah dan pihak berkonflik, dan dimediasi, serta didukung pihak internasional. Namun perjanjian-perjanjian ini gagal karena lemahnya komitmen politik, ketidakpercayaan antar pihak, serta kompleksitas kelompok pemberontak yang terus berfragmentasi, sehingga implikasi di lapangan susah untuk dilakukan. Penutupan UNAMID pada tahun 2020 tidak menandai berakhirnya konflik dan dampaknya di Darfur.

2.1.4 Konflik Kordofan Selatan dan Nil Biru 2011

Kordofan Selatan dan Nil Biru adalah dua wilayah yang belum selesai dari perjanjian CPA tahun 2005 antara Sudan dan Sudan Selatan. Letaknya yang berada di perbatasan, nasibnya belum terselesaikan hingga tahun 2011 dan tahun-tahun selanjutnya. Selama berulang kali pergantian rezim dan konsentrasi politik-

²⁹ Institute for War and Peace Reporting. *International Failures Prolog Darfur's Misery*. Diakses dalam: <https://iwpr.net/global-voices/print-publications/international-failures-prolong-darfurs-misery> (14/10/2025. 21.08 WIB)

³⁰ Human Right Watch. *Violence in West Darfur*. Diakses dalam: <https://www.hrw.org/news/2023/11/26/violence-west-darfur> (16/10/2025. 04.17 WIB)

ekonomi yang tersentralisasi pada kelompok Arab dan kelompok-kelompok terarabisasi di Khartoum, kampanye dari Sudan Selatan yang melakukan perlawanan terhadap marginalisasi tersebut, mendorong separatisme, mulai menggema di pinggiran Sudan, khususnya Kordofan Selatan dan Nil Biru.³¹

Akhirnya pada tanggal 5 Juni 2011, konflik di Kordofan Selatan pecah antara SAF dan SPLA-N, pecahan dari SPLM Sudan Selatan. Pemicu utamanya adalah hasil dari pemilihan gubernur yang dimenangkan oleh Ahmed Haroun, yang sedang dicari oleh *International Criminal Court/ICC* karena kejahatan yang serius di Darfur, serta ketegangan pengaturan keamanan di wilayah tersebut juga memicu konflik. Pada konflik ini, SAF melancarkan pemboman udara dan penembakan di wilayah penduduk tanpa pandang bulu sehingga menewaskan dan melukai masyarakat sipil. Beberapa properti penting bagi masyarakat, seperti rumah, sekolah, tanaman pangan, ternak, hingga klinik kesehatan mengalami kerusakan serius. Penjarahan dan pembakaran properti sipil hingga penahanan sewenang-wenang juga terjadi.³²

Sebagai upaya menuju gencatan senjata, Menteri Luar Negeri Sudan saat itu, Ali Karti, mengatakan bahwa pemerintah Sudan akan mengizinkan kelompok bantuan untuk bekerja di Nil Biru dan Kordofan Selatan jika pemberontak

³¹ Claudio Gramizzi & Jerome Tubiana. *New War, old enemies: Conflict Dynamics in South Kordofan*. Diakses dalam: <https://www.smallarmssurvey.org/sites/default/files/resources/HSBA-WP29-S.Kordofan.pdf> (17/10/2025. 03.39 WIB)

³² HRW. *Under Siege, Indiscriminate Bombing and Abuse in Sudan's Southern Kordofan and Blue Nile States*. Diakses dalam: <https://www.hrw.org/report/2012/12/11/under-siege/indiscriminate-bombing-and-abuses-sudans-southern-kordofan-and-blue> (05/11/2025. 09.00 WIB)

menghentikan pertempuran di dua wilayah tersebut.³³ Pada Agustus 2012, akhirnya pemerintah Sudan, diwakili oleh Mohamed Ibn Omar Hamdan, *Humanitarian Aid Commission/HAC*, menandatangani sebuah MoU dengan pihak UA, UN, dan Liga Negara-negara Arab untuk membuka akses kemanusiaan ke wilayah konflik dan menetapkan gencatan senjata.³⁴ Namun pada November 2012, pemerintah menyatakan tidak akan memperpanjang kesepakatan. Baik pemerintah Sudan dan gerakan pemberontak SPLA-N gagal melaksanakan kesepakatan,³⁵ dan konflik terus berlanjut.

2.1.5 Konflik Kudeta 2019-2021

Pada 11 April 2019, kudeta telah dilakukan oleh militer Sudan dan Presiden Omar Al-Bashir diturunkan dari jabatan 30 tahunnya sebagai presiden. Selain presiden, militer membubarkan pemerintahan, pembekuan konstitusi, dan rencana membentuk dewan militer yang nantinya akan memimpin pemerintahan transisi selama dua tahun menuju pemerintahan sipil. Namun pengunjuk rasa masih tidak menyetujui rencana apapun mengenai pemerintahan yang dipimpin militer, sehingga mereka melakukan aksi duduk dengan tuntutan pemerintahan transisi-sipil.³⁶ Kondisi ini memuncak pada tanggal 03 Juni 2019 ketika pasukan keamanan

³³ Sudan Tribune. *Only Ceasefire Can Allow Return of Aid Groups to Blue Nile and Kordofan - Sudan's FM*. Diakses dalam: <https://sudantribune.com/article/39804> (05/11/2025.09.24 WIB)

³⁴ Peace Agreements. *Agreement on the Provision of Humanitarian Assistance and Cessation of Hostilities for the Two Areas of Blue Nile and Nuba Mountains/South Kordofan*. Diakses dalam: <https://www.peaceagreements.org/agreements/2478/> (05/11/2025. 09.31 WIB)

³⁵ Sudan Research, Analysis, and Advocacy by Eric Reeves. *International Acceptance of Khartoum's Continuing Campaign of Extermination*. Diakses dalam: <https://sudanreeves.org/2012/11/13/international-acceptance-of-khartoums-continuing-campaign-of-extermiation> (05/11/2025. 09.49 WIB)

³⁶ Britannica. *Challenge to Bashir's Rule the 2019 Military Coup*. Diakses dalam: <https://www.britannica.com/place/Sudan/Challenge-to-Bashirs-rule-and-the-2019-military-coup> (05/11/2025. 10.44 WIB)

termasuk RSF menyerbu pengunjuk rasa dan membubarkan paksa dengan kekerasan.³⁷

Sejak Desember tahun 2018 hingga April 2019, sebanyak 70 orang tewas akibat tindakan kekerasan keamanan terhadap pengunjuk rasa.³⁸ *National Intelligence and Security Service/NISS*, Badan Intelijen Internal dan Eksternal Sudan pada periode pemerintahan Presiden Bashir, dan polisi telah melakukan penembakan dengan peluru tajam dan gas air mata untuk tujuan pembubaran hingga tindakan yang dilakukan oleh NISS ini juga menewaskan beberapa pengunjuk rasa. Adapun pasokan makanan dan air di Khartoum, telah diputus oleh pemerintah kota, termasuk dilakukan penggeledahan dan penyitaan kepada mobil-mobil yang mengangkut makanan dan air bagi pengunjuk rasa.³⁹

Upaya pemerintah setelah penurunan Bashir adalah membentuk *Transitional Military Council/TMC* sebagai otoritas sementara yang kemudian menegosiasikan dengan *Forces for Freedom Change/FFC*, suatu kelompok sipil, untuk membentuk pemerintahan sipil. Akhirnya ditandatangani perjanjian pembagian kekuasaan yang dikenal sebagai deklarasi konstitusional, sehingga mereka membentuk dewan kedaulatan transisi yang terdiri dari militer-sipil dan akan mengambil alih kekuasaan sebelum pemilu tahun 2022. Terdapat juga kesepakatan bahwa Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan dari SAF akan memimpin

³⁷ Libcom. *Sudan: Behind the Massacre in Khartoum*. Diakses dalam: <https://libcom.org/article/sudan-behind-massacre-khartoum> (05/11/2025. 10.52 WIB)

³⁸ HRW. *Sudan: Protesters Killed, Injured*. Diakses dalam: <https://www.hrw.org/news/2019/04/09/sudan-protesters-killed-injured> (05/11/2025. 11.00 WIB)

³⁹ Amnesty. *Sudan: Government Mounts Lethal Offensive Against Protesters Killing Nine, Blocking Food and Water Supplies*. Diakses dalam: <https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2019/04/sudan-government-mounts-lethal-offensive-against-protesters-killing-nine-blocking-food-and-water-supplies> (05/11/2025. 11.14 WIB)

selama 21 bulan pertama, dan akan dilanjutkan oleh seorang warga sipil.⁴⁰ Namun pada 25 Oktober 2021, kudeta militer kembali dilakukan oleh militer Sudan yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah, hal ini telah mengganggu proses transisi Sudan menuju negara demokrasi.⁴¹

2.1.6 Konflik SAF-RSF dan Krisis Kemanusiaan Sudan 2023-2024

Pada tahun 2023, konflik besar terjadi antara SAF dan paramiliter RSF. Konflik ini berakar pada penurunan Presiden Omar al-Bashir yang sudah menjabat selama tiga dekade sejak kudeta pada tahun 1989. Setelah Omar al-Bashir lengser, masyarakat sipil menginginkan bentuk negara demokrasi sehingga dibentuk pemerintah gabungan dari militer dan sipil, namun kembali di kudeta pada tahun 2021 oleh kepala angkatan bersenjata SAF dan pimpinan paramiliter RSF. Permasalahan utamanya adalah perbedaan pendapat mengenai usulan Jenderal Burhan untuk menggabungkan RSF dengan 100.000 personelnya ke dalam angkatan darat, dan siapa yang akan memimpin penggabungan militer dan paramiliter ini menjadi pertanyaan, sementara kedua masing-masing pemimpin tidak ingin meninggalkan posisi kekuasaan tertinggi.⁴²

Hasil dari perbedaan pendapat tersebut berakhir pada baku tembak tanggal 15 April 2023, Konflik ini dimulai pada dini hari ketika RSF mengerahkan pasukannya pada lokasi-lokasi yang strategis di Ibu Kota Sudan, Khartoum. Landasan udara militer di kota Merowe juga mengalami serangan saat itu. Beberapa

⁴⁰ Britannica. *Challenge to Bashir's Rule the 2019 Military Coup*. Op.Cit.

⁴¹ Human Right Commission. *Military Coup in Sudan: Implication for Human Right*. Diakses dalam: <https://humanrightscommission.house.gov/events/hearings/military-coup-sudan-implications-human-rights> (05/11/2025. 11.54 WIB)

⁴² BBC. *Sudan War: A Simple Guide to What Is Happening*. Diakses dalam: <https://www.bbc.com/news/articles/cjel2nn2z9o> (29/09/2025. 10.01 WIB)

jam setelah serangan tersebut, pertempuran antara RSF dan SAF dimulai. Beberapa hari setelahnya, konflik sudah menyebar ke bagian negara lainnya.⁴³ Untuk merespon konflik yang terjadi, SAF atas nama pemerintah transisi, menghadiri negosiasi antara SAF dan RSF yang dimediasi oleh AS dan Arab Saudi di Jeddah dan menghasilkan Deklarasi Komitmen Jeddah untuk melindungi masyarakat sipil Sudan.⁴⁴ Namun kedua belah pihak masih terus melanjutkan pertempuran hingga tahun 2024, dimana keduanya harusnya mematuhi negosiasi.⁴⁵

Pemerintah juga memberi resolusi untuk penghentian permusuhan dengan segera dan pemberian akses kemanusiaan sehingga memungkinkan tidak adanya hambatan. Namun tidak ada langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk melindungi, dan pertempuran masih terus berlanjut di seluruh negeri.⁴⁶ Pemerintah juga membentuk komite penyelidikan pelanggaran, namun hanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh RSF.⁴⁷ Hal ini dapat dijelaskan melalui bentuk pemerintah transisi Sudan sejak tahun 2021, sebagaimana berikut:

⁴³ HRW. 2023. Sudan: Fighting Erupts Between Armed Forces. Diakses dalam : <https://www.hrw.org/breaking-news/2023/04/15/sudan-fighting-erupts-between-armed-forces>

⁴⁴ Human Right Council. *Report of the Independent International Fact-Finding Mission for the Sudan*. Diakses dalam: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session57/advance-versions/A_HRC_57_23_AdvanceUneditedVersion.docx (21/10/2025. 13.50 WIB)

⁴⁵ Center for Preventive Action. *Civil War in Sudan*. Diakses dalam: <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/power-struggle-sudan> (21/10/2025. 13.59 WIB)

⁴⁶ Amnesty Internasional. *Sudan: One Year Since Conflict Began, Response from International Community Remains Woefully Inadequate*. Diakses dalam: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/04/sudan-one-year-since-conflict-began-response-from-international-community-remains-woefully-inadequate> (21/10/2025. 14.09 WIB)

⁴⁷ HRW. *Sudan: Events of 2023*. Diakses dalam: <https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/sudan> (21/10/2025. 14.21 WIB)

Tabel 2.1 Struktur Kepemimpinan Sudan 2019-2024

No.	Periode Konflik	Tahun	Bentuk Pemerintahan	Kepala Pemerintahan	Struktur Pemerintahan
1.	Protes dan Kudeta	2019-2022	Pemerintahan transisi sipil-militer	Abdel Fattah Al-Burhan & Abdalla Hamdok	Dewan Berdaulat, Kabinet, Dewan Legislatif. ⁴⁸
2.	Konflik SAF dan RSF	2023-2024	Pemerintah militer <i>de facto</i>	Jend. Abdel Fattah Al-Burhan (Ketua SAF) ⁴⁹	Beberapa kementerian beroperasi.

(Sumber: Constitute & Netherlands Institute of International Relations)

Berdasar pada tabel tersebut, pemerintah yang dimaksud dalam memberikan upaya, keputusan, kebijakan, dan lain sebagainya, pada masa konflik yang berlangsung antara SAF dan RSF di tahun 2023, merupakan pihak yang turut bertikai. Namun dalam membantu masyarakat sipil terdampak konflik, dalam beberapa laporan ICRC, beberapa Kementerian, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Produksi dan Sumber Daya Ekonomi, dan Kementerian Sumber Daya Hewan dan Perikanan, juga ikut andil mengambil peran melalui kerjasama dengan ICRC.⁵⁰

Situasi kemanusiaan di Sudan sejak pertengahan April hingga akhir tahun 2023, menurut laporan *Office for the Coordinate of Humanitarian Affairs/OCHA*,

⁴⁸ Constitute. *Sudan's Constitution of 2019*. Diakses dalam: <https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/19705> (21/10/2025. 15.33 WIB)

⁴⁹ Netherlands Institute of International Relations. *Military Coup Betrays Sudan's Revolution: Scenario to regain the path towards full civilian rule*. Diakses dalam: <https://www.clingendael.org/sites/default/files/2021-11/PB%20Sudan%20Coup.pdf> (22/10/2025. 17.59 WIB)

⁵⁰ ICRC. *The ICRC in Sudan. January to December 2024*. Diakses dalam: <https://www.icrc.org/sites/default/files/2025-03/Sudan%20Facts%26Figures%202024.pdf> (22/10/2025. 18.15 WIB)

sebuah Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan di bawah naungan PBB, menyatakan sebanyak 7,2 juta orang telah mencari perlindungan di dalam maupun luar negeri, setengahnya merupakan anak-anak. Konvoi kemanusiaan yang dilakukan oleh ICRC tanggal 10 Desember 2023, di lingkungan Al-Shajara di Khartoum, mendapat serangan hingga menewaskan dua orang, tujuh orang terluka, tiga diantaranya adalah staff ICRC, tiga kendaraan dan tiga bus berlambangkan palang merah dengan jelas.⁵¹

Laporan 15 April 2024, tepat setahun setelah meledaknya konflik Sudan, OCHA, sekitar 24,8 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, dan 14 juta diantaranya merupakan anak-anak.⁵² *The Armed Conflict Location and Event Data Project/ACLED*, juga merilis laporan tepat setahun konflik Sudan berlangsung. Lebih dari 15.500 orang telah tewas sejak awal konflik. Sejak 15 April 2023 hingga 05 April 2024, untuk kasus kekerasan politik, Khartoum menjadi tempat dengan 3.660 kasus dan laporan kematian mencapai 7.050 jiwa. Jumlah tersebut membuat Khartoum memiliki data kasus terbanyak. Untuk kasus kekerasan yang menargetkan warga sipil, Khartoum juga mencatat data paling banyak. Sejumlah 650 insiden atas kasus ini dan menewaskan sekitar 1.470 korban jiwa. Di Darfur

⁵¹ OCHA. *Sudan Humanitarian Update*. 14 Desember 2023. Diakses dalam: <https://www.unocha.org/publications/report/sudan/sudan-humanitarian-update-14-december-2023> (19/05/2025, 10.18 WIB)

⁵² OCHA (15 April 2024). *Sudan Situation Report*. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (OCHA). Diakses dalam: https://reports.unocha.org/en/country/sudan?_gl=1%2aeinl11%2a_ga%2aMTgyODA0NjA3NC4xNzEzNTY1MDg3%2a_ga_E60ZNX2F68%2aMTcxMzU2NTA4Ny4xLjEuMTcxMzU2NTQ1MC4yNy4wLjA (06/05/2025, 20.55 WIB)

dengan kemungkinan besar berakibat fatal bagi warga sipil, 32 persen dari seluruh kematian warga sipil di Sudan tercatat di Sudan.⁵³

Perempuan dan anak-anak perempuan juga mengalami kekerasan seksual di Sudan. Terdata sejak September 2023, RSF dan milisi sekutu telah memperkosa banyak anak perempuan dan wanita, termasuk perbudakan seksual, terutama di negara bagian Kordofan Selatan. Total penyintas beserta saksi lain, HRW mendapat informasi mengenai 79 perempuan dan anak perempuan dengan kisaran usia 7 hingga 50 tahun yang melakukan pelaporan bahwa telah diperkosa.⁵⁴ Laporan HRW tanggal 10 Desember 2024 mengenai kejahatan perang yang terjadi di Kordofan Selatan, RSF telah melukai, menewaskan puluhan warga sipil, menculik, memperkosa, dan kejahatan lainnya pada serangannya di Habila dan Fayu, sekitar bulan Desember 2023 – Maret 2024 (dua kota di negara bagian Kordofan Selatan).

HRW mendokumentasikan 56 orang tidak bersenjata terbunuh pada serangan ini, diantaranya adalah 11 orang perempuan dan 1 orang anak. Mereka dieksekusi di rumah mereka sendiri atau dengan cara ditembak di jalanan. RSF menyerang Kota Habila yang dikuasai SAF pada tanggal 31 Desember 2023, dan hari-hari berikutnya, sebanyak 35 warga sipil dan tentara tanpa senjata tewas. Begitu pun di Kota Fayu yang juga dikuasai oleh SAF mendapat serangan pada tanggal 1 Januari 2024, sebanyak 21 warga sipil tewas. Sejumlah 18 perempuan,

⁵³ Ali Mahmud Ali & Nohad Eltayeb. *One Year of War in Sudan*. Diakses dalam: <https://acleddata.com/2024/04/14/sudan-situation-update-april-2024-one-year-of-war-in-sudan/> (03/10/2025. 14.49 WIB)

⁵⁴ Human Right Watch. *Sudan: Pejuang Memperkosa Perempuan dan Anak Perempuan, Menyandera Budak Seks*. Diakses dalam: <https://www.hrw.org/news/2024/12/15/sudan-fighters-rape-women-and-girls-hold-sex-slaves> (04/08/2025. 18.06 WIB)

anak perempuan, dan 5 orang laki-laki diculik. RSF juga menjarah dan menghancurkan properti warga sipil.⁵⁵

Di Darfur, sebanyak 100 orang telah dinyatakan tewas dan ratusan orang mengalami luka-luka, diantaranya termasuk perempuan juga anak-anak, karena serangan udara yang menurut RSF dilakukan oleh SAF, namun SAF mengatakan itu bagian dari kebohongan RSF untuk tetap memperbaiki nama baiknya. Selama 20 bulan konflik sejak April 2023, puluhan ribu orang telah tewas dan jutaan lainnya mengungsi. Di Khartoum, RSF menembak sebuah bus dan menewaskan setidaknya 15 orang, dan bahkan di ibu kota tersebut, sisa-sisa fasilitas medis yang masih berfungsi, yaitu rumah sakit Al-Nao yang menerima pasien di daerah tersebut. Rumah sakit tersebut juga menerima 45 orang terluka lainnya dari berbagai daerah di Omdurman, Khartoum Raya.⁵⁶

Laporan *World Health Organization/WHO* tanggal 31 Oktober 2024, setelah 18 bulan konflik di Sudan berlangsung. Warga sipil, bangunan-bangunan sipil, hingga layanan kesehatan ikut terserang dalam eskalasi bentrokan yang terjadi di beberapa negara bagian. Sejak April 2023 hingga Oktober 2024, WHO memverifikasi 119 serangan kepada perawatan kesehatan. Hal ini menyebabkan 189 kematian dan 140 orang mengalami cedera. Pada bulan oktober 2024, 10 serangan terbaru dari 119 serangan tadi terjadi. Serangan ini mengakibatkan 6 kematian dan 15 cedera.

⁵⁵ *Human Right Watch. Sudan: War Crimes in South Kordofan.* Diakses dalam: <https://www.hrw.org/news/2024/12/10/sudan-war-crimes-south-kordofan> (04/08/2025. 22.56 WIB)

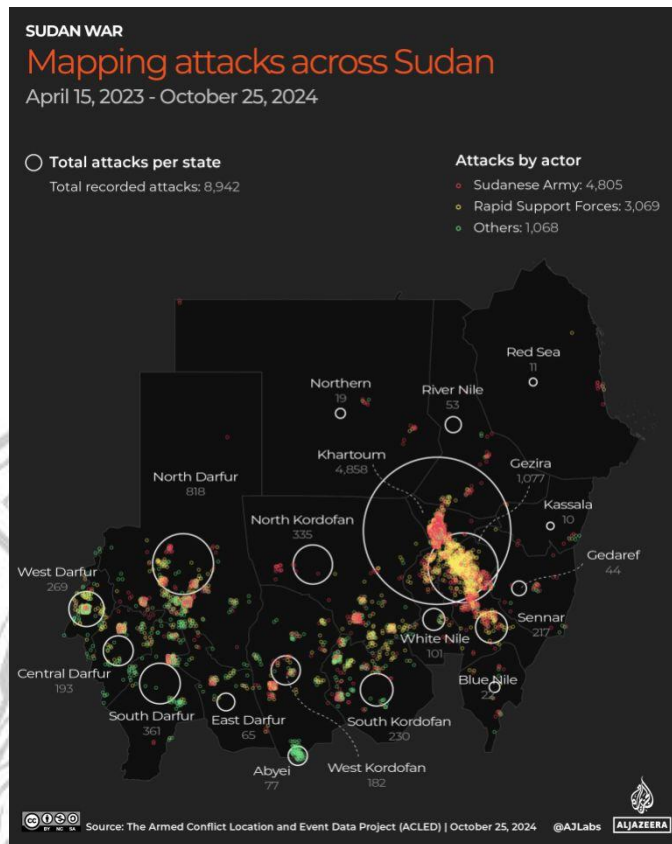
⁵⁶ *The Guardian. Airstrike on North Darfur market kills more than 100, says Sudan Lawyers' group.* Diakses dalam: <https://www.theguardian.com/world/2024/dec/10/airstrike-north-darfur-market-kills-people-sudan> (04/08/2025. 23.28 WIB)

Di sisi lain, kolera sudah menyebar dengan 29.147 kasus dan 852 kematian karenanya di 11 negara bagian, dilaporkan hingga akhir bulan Oktober 2024. Permasalahan besarnya adalah ketidak berfungsi layanan kesehatan secara efektif. Di negara bagian Sudan yang terdampak konflik, fasilitas kesehatan yang berfungsi adalah kurang dari 30%. Adanya ketidakamanan sangat menghambat pasien dan tenaga kesehatan untuk menjangkau rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Pelonjakan penduduk akibat peralihan penduduk secara besar-besaran juga membuat tenaga kesehatan di negara bagian lain mengalami kewalahan.⁵⁷

ACLED mencatat bahwa antara 15 April 2023 hingga 25 Oktober 2024, kedua pihak yang berkonflik telah bertukar serangan sebanyak hampir 9.000 serangan. Rata-rata serangan perharinya adalah sejumlah 16 serangan. Serangan ini divisualisasikan oleh Al Jazeera sebagaimana berikut:

⁵⁷ WHO. *Sudan: Health Emergency Situation Report 31 October 2024*. Diakses dalam: <https://www.emro.who.int/images/stories/sudan/situation-report-october-2024.pdf?ua=1> (04/08/2025. 22.58 WIB)

Gambar 2.1 Titik Serangan di Seluruh Sudan



(Sumber: Al Jazeera)

Berdasar pada gambar tersebut, Khartoum merupakan wilayah terbanyak yang mengalami serangan, yakni sebanyak 4.858 serangan sejak 15 April 2023 hingga 25 Oktober 2024. Sebanyak 24.000 orang dilaporkan tewas, jumlah ini di luar dari jumlah kematian karena penyakit menular, masalah kekurangan gizi, dan layanan kesehatan yang tidak memadai.

Krisis kemanusiaan merupakan serangkaian dari peristiwa ataupun suatu peristiwa yang mengancam keselamatan, masalah keamanan, masalah kesehatan, dan kesejahteraan kelompok/komunitas manusia secara besar-besaran dan wilayah yang luas. Krisis kemanusiaan dapat dibagi menjadi tiga jenis, salah satunya

digolongkan akibat keadaan darurat yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri, dan dalam situasi Sudan, konflik juga menjadi penyebabnya. Krisis kemanusiaan bisa berdampak pada banyak manusia, selain itu bisa berdampak pada sosial-ekonomi, lingkungan dan ekologi, juga berdampak pada kesehatan fisik hingga mental manusia.⁵⁸

RSF dan SAF telah mendorong Sudan pada krisis kemanusiaan. Keadaan yang terjadi di Sudan sangat kompleks, mulai dari negara bagian yang terdampak hingga menyebar ke negara-negara bagian yang kini mulai menjadi tempat yang tidak lagi aman, kemudian menggiring pengungsian kembali. Pemerintah yang tidak bisa diharapkan, kemerosotan ekonomi juga tidak luput membuat kelaparan yang parah di Sudan. Tidak adanya keamanan bagi anak-anak perempuan dan perempuan yang menjadi korban pemerkosaan dan budak seks. Perlindungan terhadap fasilitas warga sipil hingga fasilitas kesehatan beserta pekerja kesehatan yang sangat penting bagi warga sipil turut menjadi sasaran konflik. Wabah kolera juga menjadikan krisis kemanusiaan lebih parah dengan keterbatasan fasilitas kesehatan.

⁵⁸ Lucy Bloxham. *What is humanitarian crisis*. Diakses dalam: <https://www.concern.org.uk/news/what-is-a-humanitarian-crisis> (11/05/2025. 19.35 WIB)

Tabel 2.2 Konflik dan Krisis Kemanusiaan Tahun 2019-2024

No.	Konflik	Krisis Kemanusiaan	Penyebab	Upaya Pemerintah
1.	Konflik Sudan 1955-1972	1 juta korban jiwa; 500 ribu pengungsi; kehancuran pemukiman di Torit, Yei, Juba, Maridi.	Ketimpangan kekuasaan antara Utara (Arab-Muslim) dan Selatan (Afrika-non-Muslim); kebijakan kolonial Inggris yang memisahkan identitas; marginalisasi politik dan ekonomi terhadap Selatan.	Pendekatan militer dan keadaan darurat; Konferensi Meja Bundar 1965 ; penandatanganan Perjanjian Addis Ababa 1972 yang memberi otonomi regional.
2.	Perang Saudara Kedua (1983–2005)	2 juta korban jiwa; jutaan pengungsi internal dan lintas-batas; penghancuran besar infrastruktur sosial.	Pelanggaran otonomi Selatan; penerapan hukum Islam nasional (syariah); perebutan wilayah kaya minyak di Selatan.	Pendekatan militer di era Bashir; intervensi AS; Comprehensive Peace Agreement 2005 (CPA) yang memberi otonomi sementara dan membuka jalan bagi kemerdekaan Sudan Selatan 2011.
3.	Konflik Darfur (2003 – ±2020)	300 – 500 ribu korban jiwa (hingga 2008); pengungsian massal; pemerkosaan & pembersihan etnis; kehancuran desa.	Diskriminasi etnis (Arab vs Non-Arab); marginalisasi pembangunan; perebutan lahan & air akibat kekeringan.	Dukungan militer pada Janjaweed ; penandatanganan Darfur Peace Agreement 2006 dan Doha Document for Peace 2011 (DDPD) ; pembentukan Darfur Regional Authority ; misi

				perdamaian UNAMID (berakhir 2020).
4.	Konflik Kordofan Selatan & Nil Biru (2011 – 2020-an)	Pemboman udara terhadap warga sipil; ribuan korban jiwa & pengungsian; kehancuran rumah, ladang, fasilitas publik.	Perselisihan pasca-CPA 2005; pemilihan gubernur; ketegangan antara SAF dan SPLA-North; marginalisasi wilayah perbatasan.	Gencatan senjata bersyarat; MoU Agustus 2012 dengan AU-PBB-Liga Arab untuk akses kemanusiaan (gagal diimplementasi); operasi militer berlanjut.
5.	Kudeta & Transisi (2019 – 2021)	100 tewas (pembantaian 3 Juni 2019); 70 korban awal protes; kekurangan pangan & air; represi dan penangkapan massal.	Penolakan terhadap rezim Omar al-Bashir; tuntutan pemerintahan sipil; ketegangan antara militer (SAF, RSF) dan kelompok sipil (FFC).	Pembentukan Transitional Military Council (TMC) ; Deklarasi Konstitusional 2019 menciptakan pemerintahan transisi sipil-militer; kudeta ulang 2021 oleh al-Burhan.
6.	Konflik SAF vs RSF (2023 – 2024)	24 ribu tewas (hingga Okt 2024); 7,2 juta pengungsi; serangan udara & darat ke permukiman; pemerkosaan, penjarahan; kolera 29 ribu kasus (852 kematian); keruntuhan layanan kesehatan (<30 % berfungsi).	Perselisihan integrasi RSF ke SAF; perebutan kekuasaan antara al-Burhan dan Hemedti; kegagalan transisi sipil-militer.	Negosiasi Deklarasi Komitmen Jeddah 2023 (AS-Arab Saudi); resolusi penghentian permusuhan; pembentukan komite penyelidikan pelanggaran RSF; kerja sama terbatas dengan ICRC dan Kementerian Kesehatan.

(Data dikelola oleh peneliti)

Tabel 2.3 Krisis Kemanusiaan Sudan 2023-2024

No.	Waktu	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	April-Desember 2023	Mencari perlindungan	7,2 juta orang, (separuh diantaranya anak-anak)	
2.		Serangan terhadap konvoi kemanusiaan	2 orang tewas 7 orang luka-luka (3 orang diantaranya staf ICRC)	Mendapat serangan di lingkungan Al-Shajara, Khartoum.
3.	15 April 2024/ 1 tahun konflik	Mebutuhkan Bantuan Kemanusiaan	24,8 juta orang (14 juta diantaranya anak-anak)	
		Kejahatan konflik menargetkan warga sipil	15.500 orang tewas	Karena konflik.
4.	15 April 2023 - 25 Oktober 2024	Kejahatan konflik menargetkan warga sipil	Sebanyak 24.000 orang dilaporkan tewas	Mendapat serangan baik dari SAF, RSF, dan aktor lain.
	15 April 2023 - 05 April 2024	Kejahatan konflik menargetkan warga sipil	Khartoum: 1.470 orang tewas Darfur: menyumbang 32% kematian warga sipil di Sudan	
5.	10 Desember 2024	Kejahatan konflik menargetkan warga sipil	Melukai, menewaskan puluhan warga sipil, menculik, memperkosa, dan lainnya.	Kordofan Selatan oleh RSF.
6.	Desember 2023-Maret 2024	Kejahatan konflik menargetkan warga sipil	Habila: 35 warga sipil dan tentara tanpa senjata tewas. Fayu: 21 warga sipil tewas	Penyerangan oleh RSF terhadap kota-kota yang dikuasai oleh SAF.

			18 perempuan dan anak perempuan diculik. 5 orang laki-laki di culik. Penjarahan dan penghancuran properti warga sipil.	
7.	April 2023-Desember 2024	Kejahatan konflik menargetkan warga sipil	Darfur: 100 orang tewas. Ratusan orang luka-luka (termasuk perempuan dan anak-anak). Khartoum: 15 orang tewas 45 orang terluka	Karena serangan udara yang dilakukan oleh RSF atau SAF di Darfur. Juga tembakan terhadap sebuah bus yang dilakukan oleh RSF
8.	Oktober 2024	Serangan terhadap bangunan sipil	119 serangan kepada perawat kesehatan. 189 orang tewas. 140 orang mengalami cedera. Disusul 10 serangan terbaru 6 orang tewas. 15 orang cedera.	

(Data dikelola oleh peneliti)

2.2 ICRC dan Kehadirannya di Sudan

ICRC hadir di negara-negara yang sudah meratifikasi Konvensi Jenewa. Beberapa tahun setelah konflik saudara Sudan yang pertama usai, ICRC hadir membuka delegasi permanen di Sudan. ICRC memiliki fokus pekerjaan sendiri di Sudan berlandaskan pada HHI dan Statuta Gerakan Palang merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Untuk mengetahui peran ICRC dalam menangani krisis

kemanusiaan di Sudan, penting juga mengetahui dasar hukum gerakannya dalam berperan.

2.2.1 Dasar Hukum dan Mandat ICRC

ICRC adalah organisasi tingkat internasional yang didirikan oleh Jean Henry Dunant, dan nama ini telah diadopsi sejak tahun 1867. Didirikan tahun 1863 untuk membentuk organisasi sukarelawan dan membentuk badan hukum internasional yang secara khusus membahas tentang perang. Kedua ide ini dipengaruhi oleh buku *A Memory of Solferino* yang ditulis Dunant pada tahun 1862 berdasar pada pengalamannya.⁵⁹ Melalui pergerakan ICRC, negara-negara telah meratifikasi Konvensi Jenewa sejak tahun 1864, oleh karenanya, negara-negara yang telah meratifikasi konvensi jenewa akan menyesuaikan keadaan pemerintahan berdasar pada HHI. Hingga 2024, semua negara telah terikat oleh keempat konvensi jenewa, serta lebih dari tiga perempat negara telah meratifikasi dua protokol tambahan konvensi jenewa.⁶⁰

Tujuan ICRC adalah melindungi nyawa, martabat, serta kesejahteraan korban dari konflik bersenjata ataupun situasi kekerasan lain, melalui pemberian bantuan kemanusiaan secara langsung serta mempromosikan kepatuhan terhadap penegakan HHI.⁶¹ Untuk menjalankan dan mencapai tujuannya, ICRC diperkokoh posisinya sebagai organisasi internasional *non-pemerintah*, dengan dasar hukum

⁵⁹ Bernard Gagnebin. *Encounter with Henry Dunant*. Geneva, Switzerland: Librairie de l'Universite GEORG & Cie, 1963, pp 40-41.

⁶⁰ ICRC. *Our Mandate and Mission*. Diakses dalam: <https://www.icrc.org/en/our-mandate-and-mission> (29/09/2025. 11.50 WIB)

⁶¹ ICRC. *How Does Law Protect in War*. Diakses dalam: <https://casebook.icrc.org/law/icrc#:~:text=Tujuan%20ICRC,yang%20dibebankan%20kepada%20pihak%20berwenang> (22/10/2025. 20.44 WIB)

dan mandat yang terkandung dalam konvensi tahun 1949, yakni Konvensi Jenewa beserta protokol tambahannya, juga ditetapkan dalam Statuta Gerakannya, juga resolusi Konferensi Internasionalnya.

Pada konvensi jenewa, status ICRC diakui sebagai organisasi yang mempunyai tugas dalam melindungi dan memberi bantuan kepada korban konflik bersenjata, serta pada pasal 3, 9, dan 10 konvensi jenewa I, ICRC diberi mandat secara langsung untuk menawarkan jasa kemanusiaannya dalam konflik.⁶² Secara khusus untuk dasar bantuannya dalam kondisi konflik bersenjata nasional, disebut dalam pasal 18, protokol tambahan II, mengenai bantuan medis, pangan, air, juga pemantauan kondisi dan perlakuan terhadap tahanan konflik.⁶³

Selain itu, pada *preamble* statuta ICRC, organisasi ini ditegaskan sebagai organisasi imparisial, netral, dan independen, yang mempunyai misi kemanusiaan eksklusif sebagai pelindung nyawa dan kehormatan korban yang diakibatkan oleh konflik, baik berupa konflik bersenjata atau kondisi kekerasan lainnya, serta memberikan bantuan untuk mereka. Berdasar pasal 2 mengenai legal statusnya, ICRC memiliki status yang setara dengan organisasi internasional dan memiliki badan hukum internasional dalam menjalankan fungsi serta memenuhi mandat dan misi kemanusiaannya.⁶⁴

⁶² ICRC. *The Geneva Conventions of 12 August 1949*. Diakses dalam: <https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/en/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf> (22/10/2025)

⁶³ DIRJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPASTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. PROTOKOL TAMBAHAN PADA KONVENSI JENEWA 12 AGUSTUS 1949 DAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERLINDUNGAN KORBAN-KORBAN PERTIKAIAN BERSENJATA INTERNASIONAL (PROTOKOL I) DAN BUKAN INTERNASIONAL (PROTOKOL II). 2003.

⁶⁴ ICRC. *Statutes of the International Committee of the Red Cross, Adopted on 21 December 1917, and edited into force on January 1918, amended on 5 February 2025*. Diakses dalam:

Berdasarkan pada pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran ICRC sebagai organisasi internasional yang menajalankan tugasnya berdasar 7 prinsip dasar gerakan, untuk menuju misi kemanusiaan dalam konflik bersenjata atau perselisihan internal, dengan memastikan perlindungan korban konflik, dan memberikan bantuan terhadap dampak langsung dari konflik. ICRC juga bisa mengambil inisiatif kemanusiaan yang masih sejalan dengan dengan prinsip dasar gerakan sebagaimana mandat konferensi internasional.

ICRC bermarkas besar di Jenewa, Swiss. Pada struktur ICRC, Majelis merupakan badan pengatur tertinggi yang mengawasi semua kegiatan ICRC. Majelis memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai perumus keputusan atau kebijakan, menetapkan sebuah tujuan dan strategi umum dari ICRC, serta menyetujui rancangan dan laporan keuangan. Di bawah majelis terdapat dewan majelis yang memiliki tugas dan tanggung jawab mendukung majelis dalam menjalankan tugasnya dan pemastian kelancaran fungsi dari ICRC, serta memiliki tugas untuk berkomunikasi secara berkala dengan Direktorat. Di bawah dewan majelis terdapat kantor presiden yang berisi presiden dan wakil presiden. Tugas dan tanggung jawab presiden adalah mewakili ICRC di panggung internasional serta menjalankan diplomasi atau promosi kemanusiaan ICRC, dalam hal ini bekerjasama dengan Direktur Jenderal. Wakil presiden memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendukung tugas presiden.

Kemudian di bawah kantor presiden terdapat direktorat yang merupakan badan eksekutif ICRC yang memiliki tugas dalam melaksanakan pengawasan strategi kelembagaan dan tujuan umum yang sebelumnya telah ditetapkan oleh majelis dan dewan majelis. Direktorat juga memiliki tugas pengelolaan staf ICRC, serta tugas untuk memastikan keberlangsungan operasional ICRC secara keseluruhan.⁶⁵

2.2.2 Kehadiran ICRC di Sudan

Dalam posisi direktorat, terdapat posisi yang disebut *Director of Operation* yang mengawasi semua delegasi yang berada di lapangan, termasuk delegasi yang ada di Sudan. Adapun delegasi yang ada di Sudan dipimpin oleh *Head of Delegation*, Pierre Dorbes, dan *Head of Delegation* ini bertanggung jawab langsung pada *Director of Operation*.⁶⁶ Di Sudan sendiri, ICRC memiliki 435 karyawan secara keseluruhan, dengan sub-delegasi dan kantor di beberapa wilayah, yakni delegasi di Khartoum, sub-delegasi di Al-Fashir, sub-delegasi di Damazin, sub-delegasi di Kassala untuk Sudan Timur, sub-delegasi di Nyala, sub-delegasi di Zalingay, kantor di Kassala, dan kantor di Kadugli.⁶⁷

Sudan telah menjadi pihak konvensi jenewa pada tahun 1957 dan protokol tambahan tahun 2006.⁶⁸ Pada tahun 2014, Kementerian Luar Negeri Sudan dan

⁶⁵ ICRC. *The Governing Bodies of the ICRC*. Diakses dalam: <https://www.icrc.org/en/governing-bodies-icrc> (29/09/2025. 12.50 WIB)

⁶⁶ ICRC. *The ICRC Directorate*. Diakses dalam: <https://www.icrc.org/en/icrc-directorate> (29/09/2025. 12.57 WIB)

⁶⁷ ICRC *Sudan: Contacts and General Information*. Diakses dalam: <https://www.icrc.org/en/document/sudan-contacts-and-general-information> (29/09/2025. 13.04 WIB)

⁶⁸ Medecins Sans Frontieres. *The Practical Guide to Humanitarian Law*. Diakses dalam: <https://guide-humanitarian-law.org/content/conventions/by-country/169-sudan/> (30/09/2025. 11.39 WIB)

pihak ICRC menandatangani pembaharuan perjanjian antarnegara yang meresmikan hubungan antara otoritas Sudan dan ICRC. Jean-Christophe Sandoz sebagai delegasi ICRC mengatakan bahwa status hukum dan diplomatik ICRC di negara tersebut telah ditetapkan dan Sudan juga mengakui mandat organisasi ICRC.⁶⁹ Tercantum juga di dalam Undang-Undang Bulan Sabit Merah Sudan tahun 2005 yang menyebutkan bahwa Masyarakat Bulan Sabit Merah/*Sudanese Red Crescent Society (SRCS)* didirikan berdasar Keputusan Dewan Menteri No. 869 tahun 1956 di bawah perlindungan Presiden Republik atau Gubernur (sesuai dengan kasus), juga diakui oleh Komite Internasional Palang Merah pada bulan November tahun 1957.⁷⁰ Melalui kedua sumber tersebut, ICRC mendapatkan pengakuan sebagai organisasi pembantu dan perlindungan korban konflik bersenjata, khususnya konflik nasional yang terjadi dan situasi kekerasan di Sudan, dan sebagaimana mandatnya sebagai penyedia bantuan kemanusiaan. Berdasar juga pada laporan ICRC, sebanyak 195 negara telah menjadi pihak dari keempat konvensi Jenewa, termasuk Sudan.⁷¹

Delegasi permanen ICRC di Sudan hadir lebih lambat dibandingkan hadirnya SRCS di Sudan. Hal yang melatar belakangi hadirnya ICRC di Sudan menurut hukum dan historis, yang pertama adalah karena Sudan telah meratifikasi konvensi jenewa, dan melalui ratifikasi tersebut, maka Sudan telah mengakui secara

⁶⁹ ICRC. *Sudan: ICRC Sign Country Agreement with Government*. Diakses dalam: <https://www.icrc.org/en/document/sudan-icrc-signs-country-agreement-government> (30/09/2025. 11.44 WIB)

⁷⁰ Undang-Undang Bulan Sabit Merah Sudan tahun 2005. Diakses dalam: <https://derechos.org/intlaw/doc/sdn2.html> (29/09/2025. 12.22 WIB)

⁷¹ ICRC. *Annexes*. Diakses dalam: <https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/en/assets/files/annual-report/current/icrc-annual-report-annex.pdf> (21/10/2025. 03.36 WIB)

hukum bahwa ICRC berperan untuk menjaga dan melaksanakan HHI. Oleh karena itu, ICRC juga berhak untuk hadir di Sudan.⁷² Kedua, latar belakang konflik Sudan yang terjadi menyebabkan banyak korban sipil, ICRC telah memulai operasinya sekitar konflik pertama atau kedua Sudan, antara pemerintah dan SPLM,⁷³ dan akhirnya membuka delegasi permanen di tahun 1978 dan membantu masyarakat terdampak konflik di wilayah Darfur, Kordofan Selatan, Nil Biru hingga Sudan Timur.⁷⁴ Selain itu, kehadiran SRCS yang lebih dahulu diakui dalam undang-undang nasional Sudan, juga diakui oleh ICRC, ini juga mempermudah masuknya ICRC serta mempermudah kerjasama nasional secara langsung untuk distribusi bantuan, perlindungan sipil, dan lain-lain.

ICRC memiliki fokus pekerjaan untuk membantu memenuhi kebutuhan kemanusiaan dan meningkatkan kualitas hidup di Sudan. Pekerjaan ICRC di Sudan dilaksanakan bersama dengan SRCS atau dilaksanakan secara mandiri dan merupakan pengembangan dari perannya dalam statuta, HHI, hingga sebagai organisasi internasional. Pekerjaan tersebut seputar mempromosikan HHI, dukungan kepada rumah sakit juga fasilitas kesehatan, dukungan tersebut berupa peralatan dan perlengkapan. ICRC juga bekerja untuk peningkatan akses bagi masyarakat untuk menjangkau air bersih melalui kerja sama dengan otoritas air setempat. Selain itu, ICRC juga bekerja untuk mendukung otoritas penyedia layanan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas. Untuk meningkatkan kualitas

⁷² ICRC. *Sudan: ICRC Sign Country Agreement with Government, Op. Cit.*

⁷³ ICRC. *Annual Report 2013*. Diakses dalam: <https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/en/assets/files/annual-report/current/icrc-annual-report-sudan.pdf> (21/10/2025. 04.21 WIB)

⁷⁴ ICRC. *Where We Work: Sudan*. Diakses dalam: <https://www.icrc.org/en/where-we-work/sudan> (21/10/2025. 03.51 WIB)

hidup masyarakat terlantar akibat konflik, ICRC bekerja mendistribusikan benih dan peralatan bagi para petani, serta memvaksinasi ternak para penggembala. ICRC juga membantu keluarga terpisah akibat konflik atau pengungsian, pembebasan tahanan atas permintaan beberapa pihak, dan dukungan bagi para tahanan berupa bantuan dasar.⁷⁵

Pendanaan ICRC berasal dari sumbangan sukarela. ICRC menerima kontribusi pendanaan dari negara pihak konvensi jenewa (pemerintah), perhimpunan palang merah dan bulan sabit merah negara-negara (nasional), Komisi Eropa, serta sumber publik dan swasta. Sebanyak 82 persen dari anggaran berasal dari pemerintah negara-negara pihak konvensi jenewa sebagai pendonor utama. Meski demikian, kontribusi tersebut tetap bersifat sukarela dan tidak terjamin kontribusi tersebut akan bertahan untuk jangka panjang.⁷⁶

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ ICRC. *About our Funding and Spending*. Diakses dalam: <https://www.icrc.org/en/about-our-funding-and-spending> (29/09/2025. 13.21 WIB)